

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anggaran Aneh Terungkap, Anies Beberkan Kelemahan E-Budgeting

Politikus PDI Perjuangan menilai Gubernur Anies Baswedan kecolongan

**Gangsar Parikesit**

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Sejumlah program dengan anggaran mencurigakan terungkap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas membeberkan kelemahan sistem penyusunan anggaran secara elektronik (*e-budgeting*) yang tak menyaring anggaran aneh-aneh itu.

Menurut Anies, sistem *e-budgeting* tidak otomatis memverifikasi anggaran kegiatan yang dimasukkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Kalau *smart system*, dia (*e-budgeting*) bisa melakukan pengecekan,” ujarnya di Balai Kota, kemarin.

Bila sebuah SKPD ingin menyelenggarakan pentas musik dengan pagu anggaran Rp 100 juta, Anies mencontohkan, SKPD itu bisa memasukkan jumlah anggarannya lebih dulu. Padahal komponen dari program itu belum diverifikasi rincian harganya. “Yang penting masuk angka Rp 100 juta dulu,” kata dia.

Anies menambahkan, ada saja pegawai SKPD yang teledor saat memasukkan komponen anggaran melalui sistem *e-budgeting*. Padahal verifikasi rincian anggaran itu masih dilakukan secara manual.

“Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun dan setiap tahun muncul angka aneh-aneh,” kata dia.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta tengah disorot oleh sejumlah kalangan. Pasalnya, dalam dokumen yang sebelumnya tak kunjung diumumkan itu belakangan diketahui terselip sejumlah program dengan nilai anggaran yang tidak masuk akal. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, misalnya, menemukan program pembelian lem untuk anak sekolah senilai Rp 82,8 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan.

Sejumlah pegiat transparansi anggaran pun mempersoalkan tidak diunggahnya rancangan KUA-PPAS 2020 di situs [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id). Hal itu dianggap mempersulit masyarakat untuk ikut mengawasi anggaran daerah.

Menurut Anies, jika *e-budgeting* tak ada kekurangannya, seharusnya sistem penganggaran elektronik itu bisa mencegah masuknya anggaran dengan angka yang tidak rasional. “Saya menerima warisan sistem ini (*e-budgeting*),” kata Anies.

Anies menggunakan sistem *e-budgeting* itu sejak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Dia pun berjanji memperbaiki kekurangan dari sistem penganggaran elektronik itu. “Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” kata dia.

Di DKI Jakarta, sistem *e-budgeting* mulai diterapkan sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015. Sistem itu antara lain dibuat untuk melindungi program kegiatan yang disusun SKPD agar anggarannya tidak diutak-atik oleh pihak tertentu. Penganggaran elektronik pun bisa mencegah masuknya anggaran “siluman” alias anggaran yang tak dibahas dalam pertemuan resmi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Sri Mahendra, menyanggah bila pemerintah DKI dianggap menyetujui sejumlah program dengan nilai anggaran yang tidak rasional. Rancangan KUA-PPAS 2020 yang telah diserahkan kepada DPRD pada Juli 2019, menurut dia, bisa berubah lantaran masih akan dibahas pemerintah bersama Dewan.

Meski begitu, Mahendra membenarkan adanya kelemahan sistem *e-budgeting*. Menurut dia, SKPD yang belum mengetahui detail komponen dari anggaran yang mereka ajukan bisa memasukkan nilai pagu dalam *e-budgeting*. “Masih belum jelas apa yang harus

diisi, tapi pagu anggarannya sudah ada,” ujar dia.

Anggota Badan Anggaran DPRD, Gembong Warsono, menilai Anies kecolongan dengan lolosnya sejumlah program dengan anggaran yang tidak rasional. “Dia (Anies) sendiri mungkin enggak paham dengan program yang diajukan pada 2020,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

● LANI DIANA | TAUFIQ SIDDIQ